

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2020/Khusus - Awal Menjabat)**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI  
**SUB UNIT KERJA** : KEPALA LEMBAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : IDA FAUZIYAH
2. Jabatan : MENTERI KETENAGAKERJAAN
3. NHK : 474

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **10.485.000.000**

1. Tanah Seluas 5920 m2 di BANJARNEGARA, WARISAN Rp. 2.368.000.000
2. Tanah Seluas 1755 m2 di MOJOKERTO, WARISAN Rp. 702.000.000
3. Tanah Seluas 330 m2 di MOJOKERTO, WARISAN Rp. 165.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 410 m2/350 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
5. Tanah Seluas 1500 m2 di MOJOKERTO, WARISAN Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **1.673.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 2PV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.025.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	170.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.917.053.504
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.245.553.504
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.245.553.504

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.